

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 34 /PB/2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK PENDUKUNG
DARURAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIDANAI ADB
GRANT NUMBER 0002-INO (SF)
(EARTHQUAKE AND TSUNAMI EMERGENCY SUPPORT PROJECT)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pencairan hibah dari ADB (Asian Development Bank) dalam **rangka** percepatan penanggulangan bencana alam **gempa** bumi dan gelombang Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi **Sumatera Utara** serta mendukung pembentukan KPPN Khusus Banda Aceh, **pemerintah** memperoleh hibah dari Bank Pembangunan Asia;
 - b. bahwa upaya pengelolaan keuangan, penyediaan pendanaan dan pengendalian anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana tersebut, baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan **Belanja** Negara, maupun lembaga donor multilateral dan bilateral **perlu** dilakukan secara bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan **Direktur** Jenderal Perbendaharaan **tentang** Petunjuk **Pelaksanaan** Pembayaran Proyek Pendukung Darurat **Gempa** Bumi dan Tsunami yang didanai ADB Grant Number 0002-INO (SF) (Earthquake and Tsunami Emergency **Support Project**).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 **tentang** Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun **2004 tentang** Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 **tentang** Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung **jawab** Keuangan Negara (Lembaran Negara **RI** Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara **RI** Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 **tentang** Perubahan Ketiga **atas** Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 **tentang** Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan **atas** Barang **Mewah** dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana **Pinjaman** Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 **Tentang Badan** Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan **Kepulauan Nias** Provinsi **Sumatera** Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 **tentang** perubahan **atas** Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 **tentang** Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 **tentang** Pedoman Pelaksanaan Pengadaan **Barang/Jasa** Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 **tentang** Kegiatan **Tanggap Darurat** dan **Perencanaan Serta** Perta **Persiapan** Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Pasca** Bencana **Alam Gempa** Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi **Nanggroe** Aceh Darussalam dan Provinsi **Sumatera** Utara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor **486/KMK.04/2000** tanggal 20 November 2000 **tentang** Perubahan Kedua KMK Nomor **239/KMK.01/1996** tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor **463/KMK.01/1998** tanggal 21 Oktober 1998 **tentang** Bea Masuk, **Bea** Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan **atas** Barang **Mewah** dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana **Pinjaman** Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor **302/KMK.01/2004** **tentang** Susunan Organisasi dan **Tata** Kerja Departemen Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor **214/KMK.01/2005** **tentang** Organisasi dan **Tata Kerja** Kantor Wilayah **Direktorat** Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12. Peraturan Menteri **Keuangan** Nomor **606/PMK.06/2004** tanggal 28 Desember 2004 **tentang** Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-63IPMK.0612005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah **Asian Development Bank** (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 masing-masing Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor 031/Ket/5/1995 j.o. Nomor 459/KMK.03/1999 dan Nomor KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK PENDUKUNG DARURAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIDANAI ADB **GRANT NUMBER** 0002-INO (SF) (**EARTHQUAKE AND TSUNAMI EMERGENCY SUPPORT PROJECT**)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan dana ADB **Grant for Earthquake and Tsunami Emergency Support Project** (Grant 0002-INO) adalah dana yang digunakan untuk membiayai sektor kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, antara lain untuk mendukung pembentukan KPPN Khusus Banda Aceh guna melancarkan pendanaan yang berasal dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.

Pasal 2

Spesifikasi dari hibah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Perjanjian : 0002-IN0 (SF)
- b. Nomor Register : 70586401
- c. Nomor Rekening Khusus : 602.082.41 1
- d. Tanggal Penandatanganan : 29 April 2005
- e. Tanggal Efektif : 21 Juni 2005
- f. Closing Date : 30 Desember 2008
- g. Jumlah Grant : USD 290.000.000
- h. Executing Agency : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BAB II

PENCAIRAN DANA

Pasal 3

Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Rekening Khusus, mekanisme Pembayaran Langsung, dan Retroaktif.

Pasal 4

- (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus nomor 602.082.411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta dan Kantor Cabang Bank Indonesia Banda Aceh.
- (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase hibah ADB No. 0002-IN0 (SF) seperti tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 5

- (1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana tercantum dalam DIPA atau Dokumen Anggaran lainnya atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran berkenaan.

(2) Dalam pelaksanaan pembayaran langsung (SPM-LS) baik dengan mekanisme Rekening Khusus **maupun** mekanisme Pembayaran Langsung, Pejabat Penerbit SPM harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan persetujuanapproval lender sesuai dengan Lampiran II peraturan ini, dapat dilaksanakan apabila SPM-LS yang diajukan dilampiri copy persetujuanapprovalatas kontrak yang bersangkutan.
- b. Pada SPM agar dicantumkan nilai, nomor dan **tanggal** kontrak termasuk adendum, nomor, dan **tanggal** BAP, kode dan besarnya persentase (**porsi**) kategori, dan **tanggal** persetujuanapprovalsepanjang dipersyaratkan.

(3) Dalam pelaksanaan pembayaran khusus untuk kegiatan yang tercantum pada Grant Agreement Schedule 1 nomor 2.E. butir 1.b. perihal pembentukan KPPN Khusus Banda Aceh Pejabat Penerbit SPM harus memperhatikan **hal-hal** sebagai berikut:

- a. Pada kegiatan yang dilaksanakan terhitung ~~sejak tanggal~~ 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal efektif grant dan tanggal penerbitan DIPA, namun belum dibayar (hutang) akan dilakukan reimbursement (direct payment) kepada rekanan melalui pembayaran Retroaktif.
- b. Untuk kegiatan yang dilaksanakan terhitung sejak **tanggal** 5 Januari 2005 sampai dengan **tanggal** efektif grant dan telah dilakukan pembayaran melalui **DIPA** (dana talangan) akan dilakukan reimbursement (direct payment ke rekening BUN).
- c. Jumlah dana yang *di-reimburse* melalui pembayaran retroaktif maksimal 30 % **dan** alokasi dan diajukan paling lambat 9 bulan **setelah tanggal** efektif grant.
- d. Pengguna Anggaran **menyiapkan** struktur pembayaran dan rencana penarikan pada kantor bayar berkenaan.
- e. Pembayaran retroaktif dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut :
 - 1) Untuk me-reimburse dana talangan yang telah digunakan, Pejabat yang bertanggung jawab **atas** pelaksanaan kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada pejabat penandatanganan SPM dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung sekurang-kurangnya:
 - Kuitansi;
 - **Kontrak/** Surat Perintah Kerja;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - **Berita Acara** Pembayaran;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang;
 - Nomor Rekening yang dicantumkan dalam SPM
 - SSP PPh.

- 2) SPM beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk dijadikan dasar bagi penerbitan Withdrawal Application Retroaktif (WA Retroaktif).
- 3) Direktur Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri mengajukan WA Retroaktif kepada ADB untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan.
- 4) ADB akan melakukan transfer dana sejumlah yang tercantum dalam WA Retroaktif ke rekening BUN.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan, **SP2D-UP/TUP** tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) di atas, tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara.

Pasal 7

- (1) Penerbitan SPM-GU oleh Pejabat Penerbit SPM harus disertai dengan daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN. Daftar rekapitulasi dimaksud ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM.
- (2) Setiap penerbitan SPM-GU Nihil/Potongan porsi pinjaman/BLN, Pejabat Penerbit SPM harus sekaligus menerbitkan SPM-RK Penggantian atas SPM-GU Nihil/Potongan dimaksud.
- (3) Atas dasar SPM-GU Nihil/Potongan tersebut pada ayat (2), KPPN menerbitkan SP2D Pengganti dalam rangka pembebanan pada Rekening Khusus berkenaan.

BAB III

PENYIAPAN APLIKASI REPLENISHMENT/REIMBURSEMENT

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyampaikan copy rekening koran Bank Indonesia untuk hibah/grant berkenaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku penerbit SPM sebagai bahan penyusunan replenishment.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan replenishment serta dokumen pendukungnya atas dasar SPM yang telah diterbitkan kepada Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dokumen pendukung tersebut meliputi :

- a. Form 1-A (Special Account Reconciliation Statement)
 - b. Form 1B (Summary Sheet)
 - c. Form 1C (Summary of Statement of Expenditures) (SLIM-SOE)
 - d. Form 2B (English Contract Summary)
 - e. Form 2C (List of Contracts Reimbursable Under Statement of Expenditures)
 - f. Copy SPM
 - g. Copy SP2D
- (3) Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, berdasarkan bahan-bahan tersebut pada ayat (2) yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku penerbit SPM segera menyampaikan permintaan replenishment/reimbursement kepada Asian Development Bank (ADB) dengan dilengkapi *covering* letter.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, diminta agar KPPN Khusus Banda Aceh dan KPPN Khusus Jakarta VI mengirimkan fotocopy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM-UP dan SPM-TUP) beserta dokumen pendukungnya, yaitu :

- a. Untuk SPM-LS :
 - Berita Acara Pembayaran (contoh pada SE DJA No. SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996).
 - *Persetujuan/approval* dari lender sepanjang dipersyaratkan.
 - b. Untuk SPM-GUP (Isi/Potongan ataupun Nihil)
 - Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (Lampiran III, SE DJA No. SE-20/A/61/0291 tanggal 11 Februari 1991) dengan pengertian bahwa rekapitulasi pengeluaran per kategori dimaksud adalah realisasi SPM-GUP yang diterbitkan pada saat itu yang terdiri dari porsi PHLN dan porsi pendamping.
 - SPM-RK Pengganti selain dilampiri dokumen tersebut di atas juga dilampiri dengan SPM-GUP Nihil/Potongan bersangkutan.
- (2) Pengiriman fotocopy SP2D beserta SPM dan dokumen pendukung tersebut pada ayat (1) agar dilaksanakan setiap hari Senin untuk semua SP2D yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada:

**Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Subdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri IV (PPHLN IV)
Gedung Perbendaharaan Lt. V
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710**

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kepala KPPN Khusus Jakarta VI dan KPPN Khusus Banda Aceh diminta memberitahukan maksud peraturan ini kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah I dan XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

BAB V

KETENTUANPENUTUP

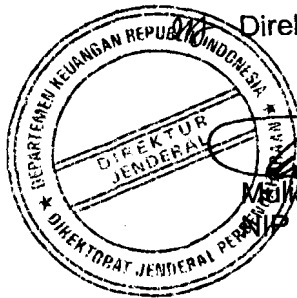
Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhing 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29** September 2005

Direktur Jenderal



Milka P. Nasution
NIP 060046519

Lampiran I
 Peraturan Direktur Jenderal
 Perbendaharaan
 Tanggal 29 September 2005
 Nomor PER-34/PB/2005

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	154.700.000	
2	Equipment, Materials, and Vehicles	40.150.000	
3	Microfinance Funds	15.000.000	
4	Studies, Surveys, Community Mobilization, Workshop and Training, NGO Services ✓	30.700.000	
5	Consulting and Auditing Services →	31.596.000	
6	Microcredit for House Expansion	3.000.000	
7	Project Management Δ	14,854.000	
	Total	290.000.000	

Exclusive of local taxes
 Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Agriculture Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	7.660.000	
1A	Farmland Rehabilitation		5.620.000
1B	Facilities		2.040.000
2	Equipment, Materials	8.110.000	
3	Vehicles	540.000	
4	Training ✓	2.200.000	
5	Consulting Services →	2.310.000	
6	Studies and Assessments ✓	850.000	
7	Trial and Demonstration ✓	130.000	
8	PPMS and Audit →	390.000	
9	Community Mobilization ✓	4.250.000	
10	Implementation and supervision Δ	3.560.000	
	Total	30.000.000	

Exclusive of local taxes
 Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Fisheries Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	10.980.000	
1A	Facilities		4.250.000
1B	Fishpond Rehabilitation		6.730.000
2	Equipment, and Materials	6.390.000	
3	Boats and vehicles	5.540.000	
4	Training	2.390.000	
5	Consulting Services	1.400.000	
6	Studies and Assessment	930.000	
7	Trials and Demonstration	220.000	
8	Community Mobilization	1.100.000	
9	Implementation and Supervision	1.050.000	
	Total	30.000.000	

* Exclusive of local taxes

* Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Micro and Small Medium Enterprises Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Microfinance Fund	5.000.000	
2	Innovation Fund	10.000.000	
3	Equipment (Computers)	50.000	
4	Vehicles	100.000	
5	Training	2.000.000	
6	Consulting Services	1.820.000	
7	PPMS and Audit	1.060.000	
8	Implementation and supervision	970.000	
	Total	21.000.000	

* Exclusive of local taxes

* Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Health Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	8.900.000	
2	Equipment, and Materials	7.000.000	
3	Assessments, Studies and System Development	1.000.000	
4	Training	1.000.000	
5	Consulting Services	2.000.000	
6	Operations and Consumables	1.900.000	
7	Project Management	1.200.000	
	Total	23.000.000	

* Exclusive of local taxes

* Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Education and Skills Development Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	7.900.000	
2	Rehabilitations Grants	2.000.000	
3	Training Teachers, Principals and Managers	4.000.000	
4	Skill Development	3.000.000	
5	Consulting Services	1.700.000	
6	University Recovery Program	1.000.000	
7	Assessments and Studies	300.000	
8	Project Management	1.100.000	
	Total	21.000.000	

• Exclusive of local taxes

* Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project) (Rural Water Supply and Infrastructure Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	8.150.000	
2	Consulting Services	2.130.000	
3	Implementation supervision	220.000	
	Total	10.500.000	

* Exclusive of local taxes

* Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project) (Housing Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	64.020.000	
1A	Basic Rehabilitation of housing		18.080.000
1B	Construction of New housing		45.940.000
2	District Community Facilitator	1.740.000	
3	Provincial Project Management Consultant	1.580.000	
4	Training/Capacity Building	70.000	
5	Travel and Office Operation	230.000	
6	Microcredit Facility for House Expansion	3.000.000	
7	Implementation supervision	1.860.000	
	Total	72.500.000	

* Exclusive of local taxes

* Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS
(Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)

(Irrigation Sector)

CATEGORY

Number	Item	Amount Allocated \$ •	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	27.280.000	
2	Equipment	220.000	
3	Community Empowerment and Training	500.000	
4	Consulting Services	2.000.000	
5	Supervision and Management	500.000	
	Total	30.500.000	

- Exclusive of local taxes
- Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS
(Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)

(Spatial Planning and Environmental Management Sector)

CATEGORY

Number	Item	Amount Allocated \$ •	
		Category	Subcategory
1	Studies and Assessments	4.630.000	
2	Equipment	540.000	
3	Training and Workshop	500.000	
4	Consulting Services	8.800.000	
5	Project Management	530.000	
	Total	15.000.000	

- Exclusive of local taxes
- Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS
(Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)

(Roads and Bridges Sector)

CATEGORY

Number	Item	Amount Allocated \$ •	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	17.800.000	
2	Consulting Services	1.200.000	
3	Project Supervision	500.000	
	Total	19.500.000	

- Exclusive of local taxes
- Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Power Sector)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Civil Works	2.000.000	
2	Equipment and Materials	7.250.000	
3	Consulting Services	250.000	
	Total	9.500.000	

- Exclusive of local taxes
- Porsi Pembayaran Lender 100%

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)			
(Fiduciary Oversight)			
CATEGORY			
Number	Item	Amount Allocated \$ *	
		Category	Subcategory
1	Equipment	577.900	
2	Consulting Services	3.544.300	
3	Workshop	297.500	
4	Project Management	3.080.300	
	Total	7.500.000	

- Exclusive of local taxes
- Porsi Pembayaran Lender 100%

Procurement

1. Except as ADB may otherwise agree, the procedures referred to in the following paragraphs of this Schedule shall apply in the procurement of goods and services to be financed out of the proceeds of the Grant. In this Schedule and the Attachment hereto, the term "goods" includes equipment and materials; the term "services" does not include consulting services.
2. Procurement of goods and services shall be subject to the provisions of the "Guidelines for Procurement under Asian Development Bank Loans" dated November 2004 (hereinafter called the Guidelines for Procurement), as amended from time to time, which have been furnished to the Recipient.
3. Procurement of goods and services shall be made without any restriction against, or preference for, any particular supplier or contractor or any particular class of suppliers or contractors, except as otherwise provided in this schedule.
4. (a) Each civil works contract estimated to cost the equivalent of more than \$5,000,000 and each supply contract for equipment or materials estimated to cost the equivalent of more than \$1,000,000 shall be awarded on the basis of international competitive bidding as described in Chapter II of the Guidelines for Procurement.

(b) For contracts to be awarded on the basis of international competitive bidding, there shall be submitted to ADB, as soon as possible, and in any event not later than 60 days before the issuance of the first invitation to bid for the Project, a General Procurement Notice (which ADB will arrange to publish separately) in such form and detail and containing such information as ADB shall reasonably request. ADB shall be provided the necessary information to update such General Procurement Notice annually as long as any goods and works remain to be procured on the basis of international competitive bidding.

(c) For contracts to be awarded on the basis of international competitive bidding, procurement actions shall be subject to review by ADB in accordance with the procedures set forth in Chapter IV of the Guidelines for Procurement. Each draft invitation to bid, to be submitted to ADB for approval under such procedures, shall reach ADB at least 21 days before it is issued and shall contain such information as ADB shall reasonably request to enable ADB to arrange for the separate publication of such invitation.
5. (a) Each supply contract for equipment or materials estimated to cost between \$1,000,000 and \$500,000 (other than minor items) shall be awarded on the basis of international shopping as described in Chapter III of the Guidelines for Procurement. The bidding period for international shopping shall be reduced to between 7 to 15 days.

(b) Each draft invitation to bid and related bid document need not be submitted to ADB for approval before they are issued.

(c) Each supply contract awarded on the basis of international shopping shall be subject to ADB's post-facto approval, provided, however, that if the award or terms of any such contract are not subsequently approved by ADB, (i) the Recipient shall not use the proceeds of the Grant to finance such contract and shall provide financing from its own or other resources, and (ii) in the event that any payment has been made from the proceeds of the Grant to finance any such contract, the Recipient shall refund such payment to ADB.

6. In comparing bids under international competitive bidding, a margin of preference may be provided, at the option of the Recipient and in accordance with the provisions of the Attachment to this Schedule, for goods manufactured in the territory of the Recipient, provided that the bidder offering such goods shall have established to the satisfaction of the Recipient and ADB that the domestic value added equals at least 20 percent of the ex-factory bid price of such goods.

7. (a) Each civil works contract estimated to cost the equivalent \$5,000,000 or less and each supply contract for equipment and materials estimated to cost the equivalent of \$500,000 or less may be awarded on the basis of local competitive bidding among contractors in accordance with the standard procurement procedures of the Recipient and acceptable to ADB. The bidding periods shall be between 15 to 21 days and evaluation period shall be between 15 to 30 days. Invitation for bids shall be published in at least 2 newspapers with a nation wide circulation. For small civil works contracts up to \$500,000 limited local competitive bidding will be followed with bidding periods 5 working days and evaluation periods 10 working days.

(b) Each civil works contract and each supply contract awarded on the basis of local competitive bidding shall be subject to ADB's post facto approval, provided, however, that if the award or terms of any such contract are not subsequently approved by ADB, (i) the Recipient shall not use the proceeds of the Grant to finance such contract and shall provide financing from its own or other resources, and (ii) in the event that any payment has been made from the proceeds of the Grant to finance any such contract, the Recipient shall refund such payment to ADB.

8. Notwithstanding the preceding paragraphs, each supply contract to cost the equivalent of less than \$100,000 shall be awarded on the basis of direct purchase through submission of quotations to be awarded within 7 days.

9. Each small works contract estimated to cost the equivalent of \$30,000 or less, may be awarded to community groups or non-governmental organizations (NGOs), in accordance with practices and procedures acceptable to ADB.

10. In view of the urgency of activities to be covered under the Project, ADB has approved advance action for the procurement of equipment, materials and civil works provided that such advance action is in accordance with the provisions of this Grant Agreement and takes place not earlier than 5 January 2005. The approval of advance action shall not in any way derogate from the obligations set forth in this Grant Agreement.

11. (a) The Recipient shall ensure that all Bank-financed good and services procured (including without limitation all computer hardware, software and systems, whether separately procured or incorporated within other goods and services procured) do not violate or infringe any industrial property or intellectual property right or claim of any third party.

(b) The Recipient shall ensure that all Bank-financed contracts for the procurement of goods and services contain appropriate representations, warranties and, if appropriate, indemnities from the contractor or supplier with respect to the matters referred to in subparagraph (a) of this paragraph.

Attachment to Procurement

(Page 1)

Preference for Domestically Manufactured Goods

1. In the procurement of goods through international competitive bidding, goods manufactured in the territory of the Recipient may be granted a margin of preference in accordance with the following provision, provided that the bidder shall have established to the satisfaction of the Recipient and ADB that the domestic value added equals at least 20 percent of the ex-factory bid price of such goods. The 20 percent domestic value added applies of the total ex-factory bid price of the goods and not only to one item in a list.
 - (a) For application of domestic preference, all responsive bids shall first be classified into the following three categories:

Category I -- bids offering goods manufactured in the territory of the Recipient which meet the minimum domestic value added requirement;

Category II -- bids offering goods manufactured in the territory of the Recipient; and

Category III – bids offering imported goods.
 - (b) The lowest evaluated bid of each category shall then be determined by comparing all evaluated bids in each category among themselves, without taking into account customs duties and other import taxes levied in connection with the importation, and sales and similar taxes levied in connection with the sale or delivery, pursuant to the bids, of the goods.
 - (c) Such lowest evaluated bids shall next be compared with each other and if, as a result of this comparison, a bid from Category I or Category II is found to be the lowest, it shall be selected for the award of contract.
 - (d) If, however, as result of the comparison under subparagraph (c) above, the lowest bid is found to be Category III, it shall be further compared with the lowest evaluated bid from Category I. For the purpose of this further comparison only, an upward adjustment shall be made to the lowest evaluated bid price of Category III by adding either
 - (i) the amount of customs duties and other import taxes which a nonexempt importer would have to pay for the importation of the goods offered in such Category III bid; or
 - (ii) **15** percent of the CIF bid price of such goods if the customs duties and import taxes referred to above exceed **15** percent of the CIF bid price.

If, **after** such further comparison, the Category I bid is determined to be the lowest, it shall be selected for the award of contract; if not, the lowest evaluated bid from Category III shall be selected for the award.

2. (a) Bidders applying the preference shall provide evidence necessary to establish the eligible of a bid for the preference, including the minimum domestic value added.

(b) The bidding documents shall clearly indicate the preference to be granted, the information required to establish the eligibility of a bid for the preference claimed, and the procedures to be followed in the comparison of the bids, all as set fort above.